

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH  
KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2018 – 2022**

**Oleh:**

**Srikandi Jessa Yunirs Mamadoa**

**NIM. 20043093**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	21
1. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	22
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
B. Anggaran.....	25
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	26
2. Laporan Realisasi Anggaran.....	28
C. Belanja Daerah.....	32
D. Analisis Belanja Daerah.....	33
1. Analisis Varians Belanja.....	34
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	34
3. Analisis Kecerassian Belanja.....	34
4. Analisis Efisiensi Belanja.....	35
E. Penelitian Terdahulu.....	36
F. Kerangka Konseptual.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Deskripsi Kota Bitung.....	43
1. Sejarah Kota Bitung.....	43

2.	Kondisi Geografis Daerah .....	43
3.	Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan .....	45
4.	Kondisi Keuangan Daerah .....	47
5.	Makna Lambang Kota Bitung .....	49
6.	Visi dan Misi Kota Bitung .....	50
7.	Struktur Organisasi .....	52
B.	Hasil Penelitian .....	53
1.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bitung T.A 2018 – 2022 .....	53
C.	Pembahasan.....	56
1.	Analisis Varians Belanja Pemerintah Kota Bitung.....	56
2.	Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Bitung.....	59
3.	Analisis Keserasian Belanja Pemerintah Kota Bitung .....	64
4.	Analisis Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Bitung .....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		69
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		71
LAMPIRAN .....		74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah daerah yang punya semangat kerja berwawasan NKRI, pasti akan mengingat terus tugasnya dalam pengelolaan APBD sebagai *Good Government* dan *Good Governance* dengan memegang prinsip Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis dan menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi bagi daerah (Wenas et al., 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi – tingginya guna membiayai kegiatan – kegiatan dan proyek – proyek di daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber – sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran – pengeluaran yang dimaksud (Milenia et al., 2022). APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) (Azahra & Lubis, 2022).

Pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri diperhadapkan pada semakin besar tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Supit et al., 2022). Banyak cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung demi mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan daerahnya didalamnya pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang ada. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat serta negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan

merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional (Vidyasari, 2022).

Salah satu unsur keuangan daerah yaitu belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran sumber ekonomi untuk segala jenis program dan kegiatan pemerintah baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjelaskan bahwa belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat (Qur'ani & Panggiarti, 2022). Setiap pemerintah daerah memiliki strategi masing – masing dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini alokasi belanja daerah.

Kota Bitung merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sulawesi Utara yang memiliki semboyan “Bitung Kota Digital”. Semboyan ini tentunya selaras dengan visi Kota Bitung yaitu Terwujudnya Bitung Kota Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Berkarakter berlandaskan Gotong royong. Adapun salah satu misi Kota Bitung yaitu menciptakan pemerintahan bersih, efektif, efisien dan hebat difokuskan pada pemerintahan yang dibentuk berlandaskan prinsip “*good governance*” dan “*clean government*” tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang professional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif, serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah. Kota Bitung setiap tahunnya melakukan penganggaran belanja yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan juga kemajuan daerah Kota Bitung. Penganggaran tersebut termuat dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bitung yang kemudian perealisasiannya dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung.

Realisasi anggaran merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah karena hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur kinerja instansi pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dari anggaran yang telah dibuat di awal kegiatan beserta penggunaannya pada saat kegiatan dengan bukti – bukti transaksi sebagai bukti atas pengeluaran dana untuk kegiatan tersebut (Sheila & Rahmi, 2023).

Sebagai salah satu unsur keuangan daerah, maka belanja merupakan salah satu komponen yang ada pada LRA yang berperan penting dalam mewujudkan perencanaan – perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Maka diharapkan perealisasi belanja tersebut juga harus dioptimalkan sebaik mungkin sehingga segala bentuk pengeluaran tepat pada sasaran. Berikut gambaran realisasi belanja Pemerintah Kota Bitung di tahun anggaran 2018 – 2022.

**Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bitung T.A 2018-2022.**

Jenis Pengeluaran Daerah	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah (Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Tidak Langsung	350.193.293.834,00	371.890.333.818,00	367.274.010.252,00	458.737.831.509,00	381.917.900.981,00
Belanja Langsung	451.234.503.980,00	615.515.427.913,85	528.516.356.922,00	267.621.474.176,00	421.864.572.297,19
<b>Jumlah</b>	<b>801.427.797.814,00</b>	<b>987.405.761.731,85</b>	<b>895.790.367.174,00</b>	<b>726.359.305.685,00</b>	<b>803.782.473.278,19</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bitung

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target anggaran dan perealisasi belanja Pemerintah Kota Bitung setiap tahunnya selalu berubah – ubah. Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 801.427.797.814,00, tahun 2019 sebesar Rp. 987.405.761.731,85, tahun 2020 sebesar Rp. 895.790.367.174,00, tahun 2021 sebesar Rp. 726.359.305.685,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 803.782.473.278,19. Adapun permasalahan yang muncul dari perealisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung yaitu terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan realisasi anggaran tahun 2018 – 2022. Sehingga dampak dari fluktuasi tersebut adalah penyerapan anggaran yang belum optimal atau belum 100%. Maka perealisasi anggaran belanja

Pemerintah Kota Bitung belum dapat dipastikan apakah menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Sehingga diperlukan analisis terhadap realisasi anggaran belanja sebagai bahan untuk evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepannya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Honga, A. F., & Ilat, V. (2014) yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini hanya difokuskan pada perealisasi belanja saja. Kemudian selain analisis varians, keserasian dan efisiensi belanja yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini menambahkan analisis pertumbuhan belanja untuk mengetahui realisasi belanja yang lebih lengkap.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Bitung untuk mengetahui realisasi anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung di tahun anggaran 2018 – 2022. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 - 2022**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah tentang “**Bagaimana realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung di tahun anggaran 2018 - 2022 ?**”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung di tahun anggaran 2018 – 2022.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bitung tentang realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2018 – 2022
- b. Memberikan masukan kepada Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan dalam hal ini mata kuliah Akuntansi Pemerintah Daerah

- c. Menambah wawasan kepada penulis tentang realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2018 – 2022.

